

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecemasan terhadap ekonomi global yang tidak stabil memberikan imbas kepada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Dalam memutuskan kebijakan terhadap perekonomian menjadi sebuah keharusan yang pasti untuk langkah kedepan yang diambil oleh pemerintah. (Rosadi & Athoillah, 2016) Adanya anggaran yang perlu dikeluarkan sebagai investasi untuk belanja negara seperti pembelanjaan barang modal, barang konsumsi, dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah tersebut wujud dari kebijakan fiskal yang mengatur jalannya perekonomian dalam menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercatat dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Winowoda et al., 2023).

Sebagai negara berkembang yang pada umumnya berpendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju, dan hal serius lainnya dalam ketidaksetaraan pendapatan disetiap daerah. Walaupun beberapa negara yang notabene masih berkembang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun masih saja terdapat halangan rintangan dalam pembangunan yang serius, proses pertumbuhan ekonomi, dan aspek sosial yang signifikan (R. Sari, 2014). Di Indonesia sendiri sebagai penyandang status negara berkembang terus melakukan usahanya supaya mendapat predikat negara maju, yakni dengan melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang salah satunya di bidang ekonomi.

Agar tumbuh dan kembangnya suatu perekonomian di Indonesia, maka harus meningkatkan pendapatan nasional seperti meningkatkan jumlah investasi, tingginya sektor industri, dan terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang berdampak pada pertumbuhan berkelanjutan serta didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri (Yuni et al., 2020). Untuk mewujudkannya kondisi Indonesia yang memiliki beribu pulau dan lautan yang luas, tidak cukup dengan sentralisasi yang memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil pengelola atau yang berada di posisi teratas yaitu pemerintah pusat (Syahwildan et al., 2022). Dengan begitu terbentuknya otonomi daerah atau desentralisasi daerah yang memberikan keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan tujuan untuk merancang sendiri peraturan daerah yang terdiri dari penyusunan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan serta keuangan daerahnya masing-masing (Lathifa, 2022).

Dalam hal ini peranan pemerintah sebagai pengatur kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan yaitu pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di negara Indonesia. Pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut memberikan efek kepada setiap daerah dimana sesuai yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Republik Indonesia terbagi kedalam provinsi, kemudian terbagi lagi ke dalam wilayah kota maupun kabupaten, dan setiap daerah tersebut memiliki kewenangan atas hak dan kewajibannya untuk mengatur serta melaksanakan urusan pemerintahan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerahnya (K. Simanjuntak, 2015).

Kewenangan pemerintah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD (R. Sari, 2014). Dengan begitu pemerintah pusat telah melimpahkan ke pemerintah daerah agar kegiatan desentralisasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi juga menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya dapat membawa dari tingkat daerah hingga nasional menuju Indonesia yang makmur, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

Dalam rangka memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat dari lingkup suatu daerah baik kota maupun kabupaten dapat dilihat dari hasil kinerja pembangunan daerahnya, yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 jika diperingkatkan dari jumlah 38 provinsi di Indonesia DKI Jakarta menempati posisi pertama, posisi kedua ada DI Yogyakarta, dan Ketiga Kalimantan Timur. Berikut ini disajikan data IPM dengan sepuluh peringkat teratas dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. 1
Peringkat IPM menurut Provinsi, 2022-2024

Peringkat	Provinsi	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	81,65	82,46	83,08
2	DI YOGYAKARTA	80,64	81,07	81,55
3	KALIMANTAN TIMUR	77,44	78,2	78,83

4	KEP. RIAU	76,46	77,11	77,97
5	BALI	76,44	77,1	77,76
6	SULAWESI UTARA	73,81	74,36	75,03
7	RIAU	73,52	74,04	74,79
8	SUMATERA BARAT	73,26	73,75	74,49
9	BANTEN	73,32	73,87	74,48
10	JAWA BARAT	73,12	73,74	74,43

Sumber: BPS Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2022-2024

Berdasarkan pemeringkatan tersebut Provinsi Jawa Barat berada di posisi kesepuluh dengan poin 74,43 walaupun hal ini sudah dalam kategori IPM Tinggi namun masih berada di posisi bawah menurut tabel di atas. Sehingga masih perlu peningkatan dalam pembangunan manusia yang berkualitas. Untuk meningkat nilai tersebut *United Nation Development Programme* (UNDP) yang memperkenalkan (*human development index*) Indeks Pembangunan Manusia dalam artian tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi saja, manusia dan kemampuannya menjadikan kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara (*United Nations Development Programme, 2024*).

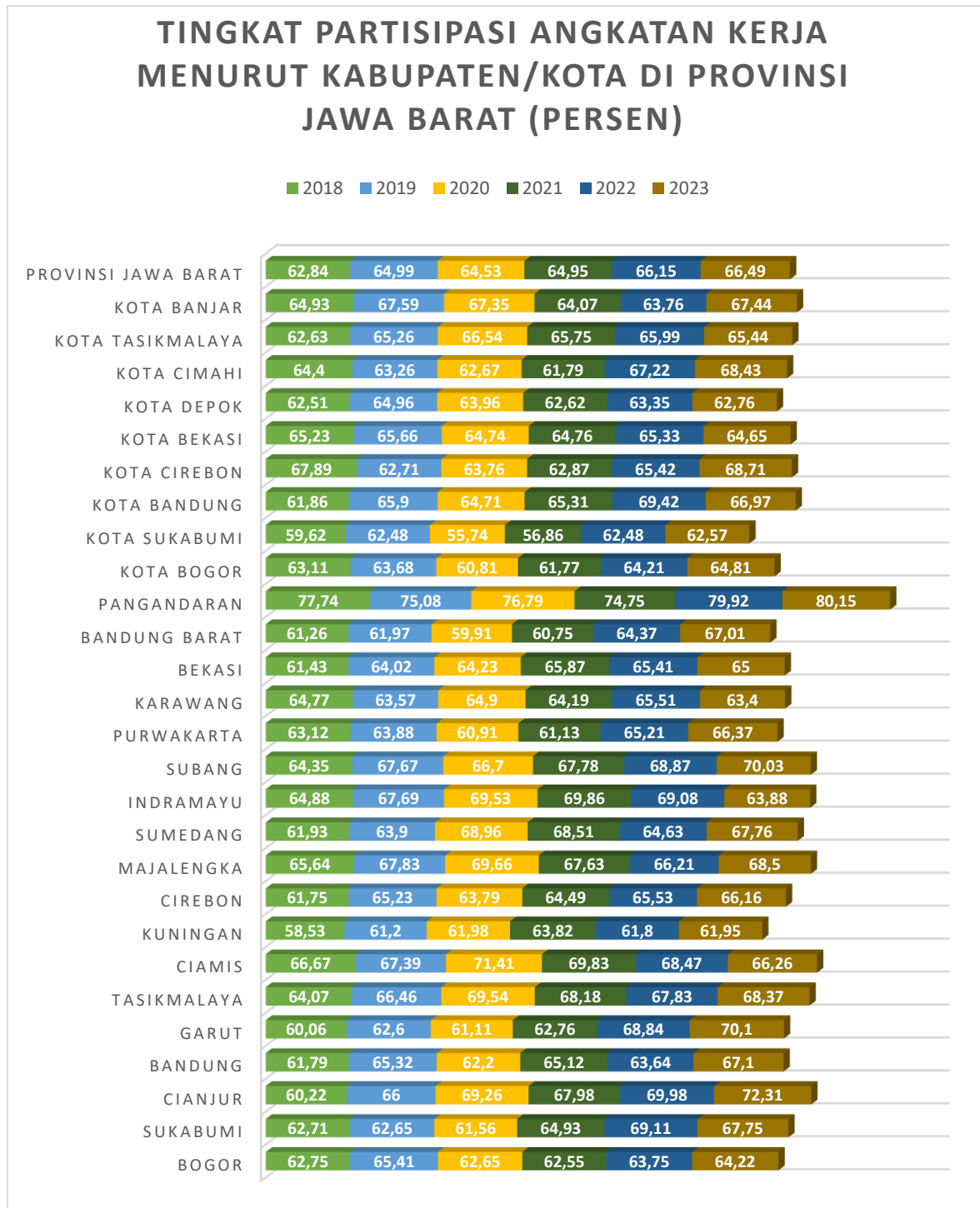
Metode dalam pengukuran IPM ini berdasarkan UNDP dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PNB per kapita (PPP US\$) atau jika menggunakan data dari BPS menggunakan Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp) dalam satuan bentuk rupiah. Dari variabel-variabel tersebut merupakan dimensi dari Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak (BPS Indonesia, 2024). Ketiga indikator tersebut menjadi tolak ukur dari kualitas hidup manusia di setiap daerahnya yang

nantinya menjadi suatu nilai IPM. Walaupun demikian, sebagai pencipta regulasi bagi tercapainya tertib sosial yaitu peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk kinerjanya mencapai keberhasilan pembangunan manusia (Nurhabibah et al., 2022).

Faktor lain dari pembangunan manusia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yaitu sumber manusia yang produktif dan menciptakan hasil untuk menambah nilai ekonomi. Tenaga kerja merupakan individu yang sudah atau sedang bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, serta mereka yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga. Secara umum, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam konteks hubungan kerja maupun tidak, untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa demi pemenuhan kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Winowoda et al., 2023).

Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat dua kelompok utama yaitu, kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja mencakup individu yang berada dalam usia kerja, sedangkan kelompok bukan tenaga kerja terdiri dari mereka yang belum mencapai usia kerja. Setiap negara memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia kerja. Di Indonesia, batas usia kerja minimum ditetapkan pada 10 tahun tanpa batas usia maksimum, sehingga individu berusia 10 tahun ke atas termasuk dalam kelompok usia kerja. Sementara itu, Bank Dunia menetapkan rentang usia kerja antara 15 hingga 64 tahun. Hal

tersebut dapat dilihat dalam data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tersedia di Badan Pusat Statistik secara nasional maupun regional.



Gambar 1. 1 TPAK menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat pada periode 2018–2023, terlihat adanya fluktuasi yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari 62,84% pada tahun 2018 menjadi 66,49% pada tahun 2023. Namun, setiap wilayah memiliki dinamika tersendiri, dengan beberapa wilayah menunjukkan pertumbuhan signifikan, seperti Kabupaten Cianjur yang meningkat dari 60,22% pada tahun 2018 menjadi 72,31% pada tahun 2023, sedangkan wilayah lain seperti Kota Depok mengalami penurunan kecil dari 64,96% pada tahun 2019 menjadi 62,76% pada tahun 2023.

Perbedaan dalam TPAK ini menunjukkan tingkat kontribusi tenaga kerja di masing-masing wilayah terhadap perekonomian. TPAK yang lebih tinggi mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pasar kerja, yang dapat menjadi indikator produktivitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Faelassuffa & Yuliani (2021) menegaskan bahwa peningkatan TPAK memiliki dampak positif terhadap IPM karena keterlibatan lebih banyak individu dalam pasar kerja dapat meningkatkan pendapatan rata-rata, mendorong daya beli, serta memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan produktivitas tenaga kerja yang meningkat, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga bertambah, sehingga memperkuat ekonomi daerah. Hal ini pada akhirnya meningkatkan dimensi ekonomi dari IPM, yaitu pengeluaran per kapita, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran IPM (Faelassuffa Assa & Eppy Yuliani, 2021).

Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Sejalan dalam hasil penelitian Rahim, Sutanty, dan Anggita (2021) menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (Rahim et al., 2021).

Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Stewart menggambarkan bahwa pembangunan manusia (dalam hal ini kesehatan dan pendidikan) telah menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan baik manusia sebagai pelaku maupun sasaran pembangunan (Wahyu Setiawan & Ariani, 2022).

Ekonomi Islam memandang bahwa pembangunan sejati adalah yang mampu menjamin kesejahteraan lahir dan batin, menjadikan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, serta menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual (Oktaviana & Harahap, 2020). Oleh karena itu, IPM dalam ekonomi Islam seharusnya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, serta

menciptakan kondisi ekonomi yang adil dan inklusif, dengan tetap menjaga nilai-nilai etika dan keadilan sosial sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (I. Setiawan, 2020).

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh *resources* yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia (Wiharja et al., 2023). Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Jatsiyat: 45:13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat, dengan pendekatan ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar (*maqasid syariah*). Data primer dikumpulkan secara sistematis dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mendorong peningkatan IPM. Melalui pendalaman terhadap dinamika alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, serta kondisi ketenagakerjaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi penguatan kebijakan publik

berbasis syariah. Dengan demikian, studi berjudul **“PENGARUH REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023”** diharapkan menjadi referensi integratif antara teori pembangunan konvensional dan prinsip ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Belanja Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana relevansi Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menguji pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menguji pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menguji pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui relevansi Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademik, memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian terhadap pengaruh realisasi belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat, lalu memberi masukan terhadap pihak terkait guna mengetahui keadaan dalam sektor tersebut dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati, khususnya pada Jurusan Ekonomi syariah.

2. Secara Praktis, bagi penulis merupakan sebagian sarana untuk mempraktekan teori-teori yang didapatkan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Manfaat bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan sebagai pembanding kinerja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

